

DAFTAR PUSTAKA

- Afni Nooraini. (2018). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)*. JEKP : Vol.5, No.2 - Desember 2018.
- Agustina, R., & Arliani, R. (2015). *Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012*. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 83-101.
- Anggraini, M., Arisman, A., & Yunita, C. (2016). *Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan*.
- Anggraini, Romandana. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbarnas.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bapenda Jabar. (2021). Pajak Kendaraan Bermotor. Diakses dari URL <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>
- _____. Bidang Pengelolaan Pendapatan. Diakses dari URL <https://bapenda.jabarprov.go.id/bidang-pengelolaan-pendapatan/>
- _____. Visi dan Misi. Di akses dari URL <https://bapenda.jabarprov.go.id/visi-dan-misi/>
- Darmadi, Hamid. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Denny George Lumy, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* vol 19, no 6, 2018.
- Djumhana, Muhammad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko P, Sri. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. JEDA. Vol 1 No 1 (2013).
- Hanipah, S., & Pratomo, D. (2015). *Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.(studi Kasus Di Kota Bandung Periode 2009-2013)*. *eProceedings of Management*, 2(3).
- Harimulyono, Nurrohman. (2008). *Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. *Media Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, vol. 8, no. 1, 2008.

- Hidayah, Devi Nurul. (2016). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2016*. Universitas Semarang.
- Karina, N., & Budiarso, N. (2016). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, E.S., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Opendata Jabar. (2021). Jumlah Pajak dan Denda Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Barat. Di akses dari URL <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-pajak-dan-denda-kendaraan-bermotor-berdasarkan-jenis-pajak-kendaraan-bermotor-pkb-di-jawa-barat>
- _____. Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya di Jawa Barat. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-pendapatan-pajak-daerah-berdasarkan-jenisnya-di-jawa-barat>
- _____. Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Cabang Pelayanan di Jawa Barat. Di akses dari URL <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-kendaraan-bermotor-berdasarkan-cabang-pelayanan-di-jawa-barat>
- _____. Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Berdasarkan Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Cabang Pelayanan di Jawa Barat. Di akses dari URL <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-bea-balik-nama-kendaraan-berdasarkan-jenis-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-bbnkb-dan-cabang-pelayanan-di-jawa-barat>
- Rakatitha, P. N. K., & Gayatri, G. (2017). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah. EJurnal Akuntansi, 1575-1600.
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, 9(1), 84-91.
- Rochmat Soemitro. (1992). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi Cetakan 4*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayetno, Hero. 2003. *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten*

- Kutai Kartanegara*. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara. Tenggarong.
- Suwarno dan Suhartiningsih. 2008. *Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Vol 7 No 2 DOI: [10.23917/reaksi.v7i2.2615](https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2615)
- TMbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Wahida, W. (2018). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo*. JEMMA| Journal of Economic, Management and Accounting, 1(1), 11-22.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.